KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : IKN kurangi kekuasaan Pemda
Tanggal : Kamis, 17 Februari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

IKN Kurangi Kekuasaan Pemda

Ibu kota negara baru akan menempati kawasan strategis yang kini merupakan wilayah kekuasaan Pemkab Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

PENAJAM, KOMPAS — Keberadaan pemerintah daerah khusus atau Otorita Ibu Kota Negara Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara bakal mengurangi kekuasaan wilayah dan kependudukan sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah diharapkan menampung aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyusun regulasi turunan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara agar dapat diterima dan tidak merugikan pihak-pihak terkait.

Dalam draf Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat, disebutkan bahwa IKN Nusantara meliputi wilayah daratan seluas lebih kurang 256.142 hektar dan wilayah perairan laut seluas sekitar 68.189 hektar. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat berkunjung ke lokasi titik nol IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Rabu (16/2/2022), mengungkapkan, ibu kota negara baru akan menempati kawasan strategis yang saat ini merupakan wilayah kekuasaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Namun, penyelenggaraan pemerintahan di IKN Nusantara terpisah dengan pemerintah daerah (pemda) yang sudah ada sebelumnya.

Pemerintahan ibu kota negara baru itu akan diselenggarakan oleh Otorita IKN Nusantara. Tak hanya itu, pemerintah daerah khusus juga akan dipimpin oleh seorang kepala otorita yang berkedudukan setingkat menteri. Karena itu, kepala otorita tak terikat dengan peraturan daerah di sekitarnya serta kementerian dan lembaga lain.

"Kawasan otorita ini diberikan kewenangan seluas-luasnya. Dia memiliki keleluasaan dan fleksibilitas untuk mengatur kawasan ini supaya tidak terikat dengan kementerian/lembaga dan peraturan daerah sekitarnya," ujar Tito yang datang bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Ketua DPR Puan Maharani.



KOMPAS/SUCIPTO

Sejumlah menteri dan pejabat negara berfoto bersama di titik nol IKN Nusantara di kawasan PT ITCI Hutani Manunggal, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (16/2/2022). Pembangunan IKN Nusantara akan dimulai tahun ini.

Selain melihat langsung lokasi titik nol IKN Nusantara, kunjungan itu juga dilakukan untuk menyosialisasikan rencana regulasi turunan UU IKN yang tengah disusun pemerintah pusat. Menurut Tito, pemerintah saat ini tengah menyiapkan peraturan pemerintah mengenai tata cara penyelenggaraan pemerintahan di IKN Nusantara yang ditargetkan rampung dalam satu bulan ke depan.

Tito akan bertemu dengan sejumlah pemerintah daerah yang terdampak kebijakan tersebut, Kamis (17/2). Kepala daerah yang diundang dalam pertemuan itu adalah Gubernur Kaltim Isran Noor, Pelaksana Tugas Bupati Penajam Paser Utara Hamdan Pongrewa, Bupati Paser Fahmi Fadli, Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah, Wali Kota Balikpapan Rahmad Masud, Wali Kota Samarinda Andi Harun.

Pertemuan itu salah satunya membahas pengurangan kekuasaan wilayah dan penduduk di pemerintah daerah sekitar IKN. "Kami ingin berdiskusi supaya mereka memahami akan ada pengurangan kekuasaan wilayah dan kependudukan. Kami juga akan menangkap aspirasi," ujar Tito.

Selain berkurangnya wilayah dan penduduk di Kaltim, menurut Tito, ada nilai tambah yang akan diperoleh Kaltim. Ia memperkirakan, dampak ekonomi di berbagai bidang akan terlihat di daerah sekitar ibu kota baru di Kaltim saat IKN dibangun.

Puan Maharani berharap pemerintah menampung aspirasi masyarakat dalam menyusun regulasi turunan UU IKN. Hal itu diharapkan bisa memperlancar proses pemindahan IKN Nusantara.

"Karena ini kepentingannya untuk jangka panjang dan masyarakat, saya meminta sinergi dan koordinasi dengan seluruh elemen bangsa, baik legislatif, pertahanan, keamanan, maupun masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Kaltim Isran Noor menyatakan tidak mempersoalkan jika wilayah Kaltim berkurang karena IKN Nusantara. Isran juga memastikan warga yang sudah menetap di sekitar kawasan IKN terjamin haknya.

Belum dialokasikan

Sembari menunggu peraturan turunan UU IKN rampung, Kementerian PUPR sudah membuat jadwal pembangunan tahap awal IKN baru. Menurut rencana, pembangunan fisik akan dilakukan pada 2022-2024. Untuk istana kepresidenan, gedung kementerian/lembaga, serta infrastruktur dasar pembangunannya akan dimulai pada semester II tahun 2022.

"Sampai 2024, kebutuhan anggarannya Rp 46 triliun. Usulan itu sudah kami sampaikan ke Kementerian Keuangan, tetapi belum dialokasikan," ujar Basuki Hadimuljono. (CIP)

DPR.RI